

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pemberian otonomi daerah, kewenangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengelola daerahnya secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang ada.

Untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini terdapat lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya independen yang memiliki tugas yang berbeda-beda, di antaranya terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propinsi, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Di samping itu masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam proses pengawasan

penyelenggaraan negara dengan cara memberikan informasi dan menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggung jawab.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Sleman dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio keserasian, serta *Debt Service Coverage Ratio*. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data target dan realisasi APBD, data target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, data biaya pemungutan PAD, serta data penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, serta dari Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis pada bab IV, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Rasio kemandirian yang semakin menurun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, yaitu dari 16,24% menjadi 13,25%. Sehingga dapat disimpulkan rasio kemandirian Kabupaten Sleman dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 masih sangat rendah dengan rasio kemandirian di bawah 25% yang menunjukkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat dan propinsi masih tinggi.

2. Rasio efektivitas Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang semakin meningkat karena adanya peningkatan penerimaan PAD, khususnya dari pajak dan retribusi daerah, yaitu dari 113,01% pada tahun 2000 menjadi 121,81% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui dinas pendapatan telah berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan rasio efisiensi Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang cukup tajam karena besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih besar daripada besarnya biaya untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu dari 13,56% pada tahun 2000 kemudian menurun menjadi 6,34% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah khususnya dinas pendapatan telah sangat efisien dalam mengeluarkan biaya untuk merealisasikan PAD.
3. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 rasio belanja rutin Kabupaten Sleman cenderung semakin menurun, yaitu dari 76,76% pada tahun 2000 menjadi 41,69% pada tahun 2003. Sedangkan rasio belanja pembangunan Kabupaten Sleman memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, yaitu dari 23,24% pada tahun 2000 kemudian meningkat menjadi 58,31% pada tahun 2003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian kabupaten Sleman semakin baik karena mulai tahun 2002 dan tahun 2003, dana yang dimiliki sebagian besar mulai diprioritaskan untuk belanja pembangunan yang menggambarkan keseriusan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya.

4. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 besarnya DSCR Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu dari (178,09) pada tahun 2000 menjadi 497,77 pada tahun 2003 karena adanya peningkatan yang cukup besar pada pos penerimaan PAD dan DAU. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan persyaratan yang dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian ini kurang mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, misalnya masa jabatan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:

1. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara mengadakan penyuluhan pajak secara rutin serta melakukan pemeriksaan rutin dan pendataan wajib pajak baru.

2. Dengan dana yang diperoleh dari penerimaan PAD sebaiknya digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta mendukung kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Misalnya meningkatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas dengan memberi kebebasan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu..
3. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan kantong-kantong pemborosan, misalnya pada anggaran belanja hanya tertulis belanja lain-lain, seharusnya ada keterangan untuk belanja apa, sehingga laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
4. Adanya kepastian hukum bagi stakeholder atau pihak yang berkepentingan khususnya para investor. Dengan jaminan kepastian hukum, para pihak yang berkepentingan diharapkan mau mengembangkan berbagai aktivitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Sleman.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, 2003, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Baswir, Revrisond, 1995, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Binder, Brian, dan Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Gade, Muhammad, 1993, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam, dan Sabeni, Arifin, 1988, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hariyadi, Sugeng, 2002, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah; Studi kasus di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No.1
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T., 2002, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika Offset.
- Karjoredjo, J. Sardi, 1999, *Desentralisasi Pembangunan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 25/Kep.KDH/2001 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 12/Kep.KDH/A/2002 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 07/Kep.KDH/A/2003 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/A/2004 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Kuncoro, Mudrajat, Ph.D., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 12 Tahun 2000.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2004.

Mamesah, D.J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo, Dr, MBA, Ak, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.

Munawir, S., 1995, *Analisa laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.

Nataluddin, 2001, *Potensi dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi jambi, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, AMP YKPN

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002-2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Perkembangan Ekonomi keuangan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 1 tahun 2000, Yogyakarta: Bank Indonesia.

Republik Indonesia, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sihaloho, F.L dan halim, Abdul, 2005, *Pengaruh Faktor-faktor Rasional, Politik, dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*, SNA 8.

Tashadi, P.J. Suwarno, Timbul Harjono, 2002, *Kabupaten Sleman dalam Perjalanan Sejarah*, Sleman : Bagian Hubungan Masyarakat.

Wajong, J, 1962, *Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Ichtiar.

Lampiran 1
Realisasi APBD Kabupaten Sleman
Tahun 2000 – 2003

No	PENDAPATAN	2000	2001	2002	2003
1	Sisa perhit tahun lalu	9.506.907.139,32	15.301.664.101,87	44.999.641.802,96	50.373.741.003,24
2	PAD	17.889.883.435,46	29.571.153.214,13	38.908.192.767,97	52.978.721.465,5
3	Bagi hasil pajak/bukan pajak	13.306.375.102,28	21.094.967.264	21.184.390.109	29.173.396.369
4	Subsidi daerah otonom	1.361.564.605,35	1.780.646.800	1.433.658.739,17	1.579.004.299,17
5	DAU	25.177.425.588	205.430.376.000	255.350.000.000	304.780.000.000
6	DAK	10.150.959.000	34.720.961.256	20.738.789.996,32	13.651.529.569
7	Pinjaman	646.763.200	631.816.000	479.025.700	348.266.300
8	Jumlah	128.039.878.070,41	308.531.584.637,09	383.093.699.115,42	452.884.659.005,91
BELANJA		2000	2001	2002	2003
9	belanja rutin (termasuk utk pembayaran pokok pinjaman)	98.286.033.092,41	270.360.861.484,59	166.417.188.525	188.823.782.934
10	belanja Pembangunan	227.125.953,09	265.059.197,72	317.546.722	373.741.003,24
11	Jumlah	29.753.844.978	38.170.723.153,5	216.676.510.590,39	264.060.876.071,81
		128.039.878.070,41	308.531.584.637,09	383.093.699.115,42	452.884.659.005,91

Sumber : APBD Kabupaten Sleman Tahun 2000 - 2003

Lampiran 2

Target dan Realisasi Penerimaan PAD dan Biaya Pemungutan Pajak

Kabupaten Sleman

Tahun 2000 - 2003

No	KETERANGAN	2000	
		Target	Realisasi
1	Pajak Asli Daerah	15.829.886.951,00	17.889.883.435,46
2	Biaya Pemungutan	2.425.726.437,00	
No	KETERANGAN	2001	
		Target	Realisasi
1	Pajak Asli Daerah	26.616.137.717,36	29.571.153.214,13
2	Biaya Pemungutan	2.049.268.114,00	
No	KETERANGAN	2002	
		Target	Realisasi
1	Pajak Asli Daerah	34.846.979.981,95	38.908.192.767,97
2	Biaya Pemungutan	3.061.379.449,00	
No	KETERANGAN	2003	
		Target	Realisasi
1	Pajak Asli Daerah	43.494.246.800,00	52.978.721.465,50
2	Biaya Pemungutan	3.356.652.275,00	

Sumber: APBD Kabupaten Sleman Tahun 2000 -2003



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 895 / 2005.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari A.n. Dekan, Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 332/R/ITanggal : 10 Mei 2005 Hal: Permohonan Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **ELIASARI WIDOWATI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 13274/EA
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : U A J Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Babarsari No 43, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl.Solo Km 7 Gg. Mangga II No 42 Janti, Sleman
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000/2001-2004/2005 "
Lokasi : Pemda.Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 17 Mei 2005 s.d
17 Agustus 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 17 Mei 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Ka Bag Perekonomian Setda Kab. Sleman.
6. Pertinggal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama**

Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 490 027 188